

HUBUNGAN ULAMA DAN UMARA MENURUT AYATULLAH SYARI'ATMADARI

Afrizal M

I

Kelompok Syi'ah meyakini bahwa hanya Imam sajalah yang mempunyai hak untuk memimpin umat, namun dengan menghilangnya Imam yang ke dua belas secara ajaib, realisasi keyakinan itu berubah. Hal ini terbukti pemerintahan sekarang dijalankan oleh orang yang bukan imam sesungguhnya. Penganut aliran Syi'ah menyetujui pemerintahan yang bukan dipegang imam dalam batas-batas tertentu. Penguasa semacam itu dipandang sebagai pelaksana tugas imam dengan mengambil perbandingan kepada pelaksanaan hukum-hukum yang berkaitan dengan peribadatan Islam.¹

Figur yang lebih dekat memegang jabatan pengganti imam ini adalah ulama. Ini membuka peluang bagi ulama untuk ikut serta memainkan peran dalam sosial dan politik. Oleh sebab itu, wajar sekali ulama Iran ikut terlibat dalam kegiatan politik pada satu basis yang berlangsung dalam sejarah Islam. Bahkan pada periode Dinasti Syafawi kaum ulama mendapat jabatan penting dalam administrasi pemerintahan ketika Syah Syafawi berhasil menyatakan dirinya keturunan langsung dari imam.²

Dengan demikian, pemerintah dan ulama merupakan suatu kesatuan yang melibatkan diri dalam sistem politik. Sistem ini lebih dekat dengan pemerintahan monarki karena di tangan Shah terletak jabatan *temporal leadership* dan *Spiritual leadership*.³

Pada masa Dinasti Qajar, para ulama berbalik menentang kebijaksanaan pemerintah karena dianggap sebagai penyimpangan dari keadilan imam. Aksi penting ini diawali dengan sikap mereka yang memisahkan diri dari pemerintahan.⁴ Hal ini disebabkan pemerintahan tidak mengikutsertakan ulama dalam urusan kenegaraan.⁵ Adapun pada masa Dinasti Pahlevi ulama tidak terlibat sama sekali dalam masalah sosial dan politik dalam jangka waktu lebih kurang 30 tahun.⁶

Dengan tersisihnya para ulama dari pemerintahan timbullah semangat para ulama untuk mengajukan tuntutan keras tentang perlunya keterlibatan mereka dalam politik. Alasan yang mendorong ulama untuk mengajukan tuntutan tersebut adalah doktrin Syi'ah sendiri yang menganjurkan agar para ulama ikut menjalankan pemerintahan selama imam tidak ada. Dengan semakin jauh Shah meninggalkan ulama membuat ulama sulit memasuki kembali bidang politik. Jalan yang mungkin ditempuh untuk menembus masalah ini adalah revolusi.

Dalam menginterpretasikan doktrin Syi'ah sehubungan dengan fungsi ulama dalam pemerintahan terdapat perbedaan konsep. Khomeni berpendapat bahwa ulama harus langsung terlibat dalam pemerintahan. Ulama harus dapat mengontrol semua tindakan pemerintah ketika ia menjalankan tugas pemerintahan.⁷ Konsep Khomeni ini bisa membawa tindakan ulama semakin tidak terkontrol karena tidak ada orang yang berhak mengontrol pemerintah kecuali ulama sendiri. Ini didasarkan pada posisi ulama yang merupakan wakil Tuhan di bumi.

Berbeda dengan pemikiran tersebut, Syari'atmadari berpendapat bahwa para ulama tidak perlu langsung terlibat dalam pemerintahan kecuali dalam kondisi terpaksa. Bagi Syari'atmadari yang penting ialah berjalannya syari'at dalam masyarakat Islam.⁸ Bila ajaran Islam sudah dijalankan oleh umat, ulama boleh tidak ikut menjalankan roda pemerintahan.

Interpretasi Syari'atmadari sejalan dengan sistem pemerintahan moderen yang berlaku di Barat. Dengan menfokuskan kepada figur Syari'atmadari tulisan ini akan mengungkapkan pemikirannya tentang kedudukan ulama dan umara.⁹

Agar pembahasan ini lebih komprehensif pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini ialah pendekatan struktural fungsional⁹ yaitu mengungkapkan pemikiran-pemikiran Syari'atmadari dilihat dari bentuk dan sistem pemikirannya dalam persoalan kedudukan ulama dalam pemerintahan. Untuk melihat latar belakang pemikiran Syari'atmadari dan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat digunakan pendekatan sosio-historis.

II

Situasi Politik Iran Sebelum Revolusi Tahun 1979

Pemerintahan Dinasti Pahlevi pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pemerintahan Dinasti Qajar. Pada masa Dinasti Qajar telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang cukup berpengaruh terhadap perjalanan politik Iran. Sistem pemerintahan Dinasti Qajar adalah bercorak sekuler. Para ulama melihat bahwa tindakan-tindakan pemerintah telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Tanpa melihat unsur keterpaksaan rezim Qajar mengadakan hubungan dagang dengan Rusia dan Inggris. Hasil perdagangan tersebut tidak membawa pengaruh yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara itu ulama melihat bahwa tindakan dan kebijakan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam Syi`ah.¹⁰ Hal ini menunjukkan pemisahan antara ulama dan pemerintah yang dalam pandangan sebagian ulama Syi`ah dianggap sekuler.

Pada masa Dinasti Pahlevi pemisahan itu ternyata lebih meningkat dan sikap pemerintahan lebih sekuler.¹¹ Reza Khan menjalankan ide ini adalah dalam rangka mengkonsolidasikan kekuasaan. Kebijakan-kebijaksanaan yang diambil oleh Reza Khan dalam pemerintahan sangat merugikan para ulama. Salah satu faktor yang sangat mengecewakan para ulama adalah pemakaian nama keluarga Pahlevi yang telah berlangsung selama lebih dari lima puluh tahun dalam merespon kepentingan-kepentingan nasional Iran. Di balik itu makna-makna unsur Islam semakin dikucilkan.

Dalam bidang pendidikan Reza Khan, mengadakan pembaharuan yang berbentuk sekuler. Cara ini ditirunya dari pengalaman dunia Barat yang telah lebih dahulu memisahkan agama dari politik dan memperkenalkan ilmu pengetahuan rasional ke dalam pendidikan umum. Sekolah-sekolah yang dibuka adalah teknik, peternakan dan pertanian, sedangkan pendidikan agama berada di bawah pengawasan negara.¹² Di samping itu Reza juga menunjukkan keberaniannya untuk mengumumkan keseragaman antara berpakaian yang tidak hanya pria yang harus memakai pakaian Barat, tetapi juga mengharuskan wanita menanggalkan cadar.¹³

Dalam bidang hukum, Reza Syah mengeluarkan undang-undang sipil, undang-undang tentang hukum pidana dan undang-undang perdagangan baru. Meskipun sebagian undang-undang itu berdasarkan syari`at, tetapi ternyata pelaksanaannya mengarah kepada hukum sekuler. Undang-undang tersebut dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan yang

ditunjuk negara di bawah kekuasaan kementerian kehakiman dan pegawai-pegawainya adalah ahli-ahli pendidikan Barat. Sistem itu adalah pengadilan agama dengan hanya seorang mujtahid sebagai hakim yang menerima gaji dari pemerintah. Pengadilan banding di Teheran juga mempekerjakan seorang *mujtahid* yang dipilih kementerian kehakiman dari daftar nama yang diajukan kepada lembaga kementerian untuk mengawasi kasus-kasus keagamaan. Pada tahun 1932 pengadilan-pengadilan syari`at tradisional yang diawasi oleh para ulama kehilangan hak untuk mencatat dokumen seperti pernyataan-pernyataan tertulis yang sah, surat kuasa para pengacara dan catatan kekayaan penguasa. Hal itu membuat para *mujtahid* dan *mullah* kehilangan pengaruh dan sumber penghasilan.¹⁴

Hal lain yang menyakitkan hati para ulama adalah tindakan Syah yang mengasingkan seorang *mullah* yaitu Ayatullah Bafqis di Qum karena keberaniannya mencela kerabat perempuan Syah sewaktu memasuki tempat suci Haerat Ma`sumah tanpa memakai cadar. Ajudan meliter utama Syah yang dikatakan telah mengotori tempat suci di dalam rumah pemujaan dengan cara berjalan ke tempat itu tanpa melepas sepatunya dan menyeret Ayatullah Bafqis dengan memegang jenggotnya ke hadapan Syah sambil menendang dan memukulinya dan cambuk.¹⁵

Selain itu peristiwa yang mengejutkan lagi adalah keributan yang terjadi pada tempat suci Imam Ali Ridha di Masyhad, Iran Timur Laut. Usaha polisi setempat tetap mamaksakan aturan memakai topi ala Eropa di tempat suci itu. Peraturan ini membuat para pelayat dan hadirin tersinggung sampai marah. Akibatnya mereka ditembaki oleh polisi sehingga banyak korban bergelimpangan di dekat masjid.¹⁶

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Syah yang banyak bertentangan dengan doktrin Syi`ah membuat ulama semakin jenuh. Mereka tidak memiliki wakil-wakil di majlis, sedangkan sebelumnya ulama menduduki 40 % kursi di Majlis. Sebagian kondisi sekolah dan lembaga pendidikan yang mereka miliki menurun tajam karena kalah bersaing dengan sekolah-sekolah pemerintah. Akibat gangguan dan kebijakan para pejabat menyebabkan sehingga penghasilan mereka semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Reza Syah kelihatan ingin memperbesar karirnya sampai menyamai Attaturk di Turki, namun Reza tidak sampai membubarkan lembaga-

lembaga keislaman secara sistematis atau memisahkan agama dan negara secara resmi. Reza mencoba memperkenalkan suatu reformasi dengan menciptakan suatu kelompok kecil moderen untuk mendukung usaha pembaharuannya. Usaha itu merupakan proses menuju perkembangan yang lebih luas dalam mensosialisasikan paham sekuler di Iran.¹⁷

Untuk melepaskan pengaruh Inggris dan Rusia di Iran Reza Syah membujuk Jerman untuk membantu usaha tersebut pada tahun 1941 sekaligus mengusir Sovyet. Tetapi sampai pada masa pemerintahan Muhammad Reza Amerika juga berusaha membantu melepaskan pengaruh Inggris dan Rusia di Iran.¹⁸ Keadaan ini membuat Amerika berhasil menanamkan hukum dan pengaruhnya di Iran dan menguasai negara itu dalam bidang ekonomi dan politik.

III

Posisi Shari`atmadari di antara Para Ulama

Kondisi politik yang dijalankan pemerintah, baik Rezim Qajar maupun Rezim Pahlevi dipandang ulama telah jauh menyimpang dari doktrin Syi`ah. Dalam aliran Syi`ah negara dipimpin oleh seorang imam. Kedudukan imam bukan hanya sebagai pemerintah semata tetapi juga sebagai wakil Allah dalam melaksanakan semua urusan di dunia dan di tangan imam terletak sebagian rahasia Tuhan.¹⁹ Tetapi karena Imam ke dua belas dalam Syi`ah sudah menghilang, tanggung jawab Imam otomatis terpaksa dipegang oleh ulama sebagai wakil Imam.²⁰ Di sisi lain al-Kulaini menjelaskan bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi dengan segala tugas dan kewajibannya.²¹

Dengan terjadinya penyimpangan dalam kepemimpinan umat Islam para ulama merasa berkewajiban menegakkan kembali ajaran yang dibawa Nabi dan imam. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam, sehingga ulama terpaksa menentang pemerintah Dinasti Qajar. Dalam menyikapi persoalan ini muncullah beberapa kelompok ulama yang tidak sepakat secara bulat dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah.

Ada tiga kelompok ulama yang terkenal di Iran. Pertama, kelompok ulama radikal yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Tokoh ini diikuti oleh Ayatullah Mahallati Shirazi, Ayatullah Shadiq Ruhami, di Qum, dan

Ayatullah Mahmud Taliqani di Teheran.²² Kelompok ini menampakkan ketegasan bahwa untuk menegakkan ajaran Islam para ulama harus terjun langsung dalam pemerintahan.

Kedua kelompok ulama pembaharu yang bersifat moderat dan toleran. Kelompok ini lebih banyak berkecimpung dalam aktifitas politik dan pendidikan. Kelompok ini dipimpin oleh Ayatullah Murteza Mutahhari yang dibunuh oleh kelompok Furqan bulan April 1929. Pengikut-pengikutnya adalah sayid Mahmud Bihisti, Mahmud Ibrahim Ayati, Husen Mazini, Sayid Murteza, Shabistani, dan Ali Syari`ati.²³ Sebagian ulama dalam kelompok ini banyak yang menjadi kaki tangan pemerintah dan serta merta bisa menjadi figur yang melegitimasi kebijakan pemerintah.

Ketiga adalah kelompok ulama konservatif yang dipimpin oleh Ayatullah Shari`atmadari. Kelompok ini pada dasarnya hanya mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Ayatullah Burujirdi, sedangkan tokoh lainnya adalah Ayatullah Mullany, Ayatullah Mahmud Reza Gulpaigani dan Ayatullah Shahbuddi.²⁴ Kelompok ini berpendapat bahwa kedudukan ulama dalam pemerintahan harus dilihat dari urgensinya memelihara kelangsungan ajaran Islam. Bila syari`at sudah tidak berjalan dalam negara, para ulama perlu ikut berpolitik dan jika syari`at sudah berjalan dengan baik para ulama cukup menjadi pengawas di luar tanpa melibatkan diri dalam pemerintahan.

Ayatullah Shari`atmadari termasuk kelompok ulama yang ketiga. Nama lengkapnya ialah Ayatullah Sayid Muhammad Kazem Shari`atmadari. Ia lahir di Tabriz pada tahun 1905, tiga tahun leboh muda dari Ayatullah Ruhullah Khomeini (1902). Shari`atmadari pertama sekali belajar di daerah kelahirannya Tabriz. Pada waktu berumur 19 tahun ia pergi ke Qum, belajar kepada Shaikh Abd al-Karim Ha`eri yang baru saja menghidupkan kembali sekolah teologi di Qum.²⁵

Berbeda dengan Khomeini yang belajar ilmu kalam, akhlak, dan filsafat, spesialisasi Shari`atmadari lebih menjurus kepada fikih. Sekitar tahun 1935 Shari`atmadari pergi ke Najaf, belajar kepada Syekh Husen Na`ini khusus dalam bidang fikih. Kemudian ia kembali ke daerah kelahirannya Tabriz dan juga mengajarkan fikih sampai tahun 1946. Setelah itu Shari`atmadari diundang oleh Ayatullah Burujirdi untuk mengajar di Qum, juga dalam bidang fikih.

dengan partai-partai beraliran kiri, di antaranya Fidayen Khalq, Mujahidin Khalq dan Partai Tudeh.³⁰

Konflik antara Shari`atmadari dengan Khomeni ialah munculnya tuduhan Khomeni dalam menduduki posisi *marja` taqlid* pada tahun 1961. Apalagi Khomeni merupakan tokoh yang lebih ahli dalam bidang teologi, sedangkan Shari`atmadari adalah ahli dalam bidang hukum.³¹

Di samping itu Shari`atmadari juga seorang tokoh yang cukup hati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Boleh dikatakan bahwa dengan kehati-hatiannya itu dia diperkirakan sebagai tokoh yang menempati posisi penting dalam revolusi pada tahun 1960-1970, tetapi pertentangannya dengan Khomeni semakin sengit dan tidak dapat didamaikan.³²

IV

Kedudukan Ulama Dalam Pemerintahan Menurut Shari`atmadari

Perbedaan mendasar antara Shari`atmadari dengan Khomeni lebih menonjol dalam bidang politik. Perbedaan ini bersumber dari konsep masing-masing tentang negara. Konsep Khomeni tentang negara adalah mengambil bentuk Republik Islam seperti yang telah disebutkan di atas, sedangkan konsep Shari`atmadari bentuk negara itu adalah Republik Demokrasi Islam. Atas dasar konsepnya itu Khomeni memunculkan Partai Republik Islam (IRP), sedangkan Shari`atmadari memunculkan Partai Republik Rakyat Islam (IPRP).³³

Dengan munculnya kata *people* dalam partai politik, menunjukkan adanya demokrasi yang terkandung di dalamnya. Paham demokrasi itu memang sedang tumbuh di dunia Islam karena pengaruh yang datang dari Barat. Sikap Shari`atmadari mendukung demokrasi itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang tokoh yang bersifat moderat.

Sikap moderat ini berbeda dari yang dipahami orang pada umumnya. Menurut ajaran Syi`ah, yang memimpin suatu negara adalah imam. Tetapi karena imam itu sekarang bersembunyi atau menghilang, tugas imam diberikan kepada ulama. Oleh sebab itu, ulamalah yang berwenang mengurus segala urusan, baik urusan negara maupun urusan agama. Sehubungan dengan ini al-Kulain menjelaskan :

Setelah Ayatullah Burujirdi meninggal, Shari`atmadari dinobatkan sebagai pemimpin *marja` taqlid* yang wilayahnya mencakup Iran, Azerbaijan, Pakistan, India, Libanon, Kuwait, dan Gulf. Di samping mengajar ia juga menerbitkan majalah *Dar al-Tabliq al-Islami* yang dijadikan majalah mahasiswa. Pengajarannya adalah memakai sistem pengajaran moderen dalam rangka menyiarkan ajaran Syi`ah ke dunia luar.²⁶

Melihat penampilan ini, kelihatan sekali bahwa Shari`atmadari adalah ulama yang cukup senior. Ia menjadi pemimpin mujtahid dan menjadi juru bicara tidak resmi antar para ulama Azerbaijan. Shari`atmadari sekelompok dengan Ayatullah Zanjami, seorang ulama Azeri yang mendukung Musadiq dan gerakan perlawanan nasional yang bersifat liberal dan sekuler.²⁷ Dukungan terhadap partai yang sekuler terlihat dalam acuannya menjamin referendum. Ia memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih bentuk negara, apakah Republik Islam atau Republik Demokrasi Islam.²⁸ Karena sikapnya yang kurang mendukung pikiran Khomeni, hal ini menimbulkan pertentangan antara dia dengan Khomeni.

Konflik antara Shari`atmadari dengan Khomeni berawal dari pernyataan Khomeni bahwa rakyat Iran telah mengatur langkah untuk berdemonstrasi menentang politik rezim Shah. Slogan selanjutnya berbunyi bahwa "siapa saja yang tidak ikut bersama kita adalah menentang kita". Shari`atmadari yang mempunyai konsep lain merasa tersinggung dengan slogan Khomeni dan sekaligus menjadi beban bagi Shari`atmadari. Ia membuat kontak dengan para ulama yang sepaham dan memunculkan suatu taktik. Shari`atmadari menyuruh pengawal untuk waspada dan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan dengan shah dan bersikap pasif walaupun semenjak Reza Pahlevi berkuasa konstitusi menjadi terancam. Di samping itu Shari`atmadari tidak bergabung dengan Khomeni untuk menghancurkan monarki tahun 1978. Dia mengemukakan taktik tersendiri, yaitu tidak mengajak berperang. Tetapi jika pemerintah menutup semua kesempatan dan kesempatan bagi ulama Shari`atmadari dan kawan-kawan akan menghancurkan semua tiran. Hal ini dimaksudkan oleh Shari`atmadari untuk menerapkan keadilan sosial yang ditetapkan oleh imam. Mereka berpendapat bahwa pemerintah itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat.²⁹ Di samping itu yang menimbulkan kejengkelan Khomeni adalah karena Shari`atmadari menggabungkan diri

محمد ابن يحيى عن ابن محمد ابن عيسى عن ابن محمد ابن خالد عن ابن البخترى
عن ابن عبد الله عليه السلام قال ان العلماء ورثة الانبياء. وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما
ولادينارا. وانما اورثوا احاديث من احاديثهم. فمن اخذ بشئ فقد اخذوا حضا وافرا. فانظروا
علمكم هذا عن تأخذونه فان فينا اهل البيت فى كل خلف عدو لاينفونه تحريف الغالين وانتحال
المبطلين وتأويل الجاهلين.³⁴

Artinya: Muhammad ibn Yahya, dari Ahmad ibn Muhammad ibn Isa, dari Muhammad ibn Khalid, dari Abi al-Bukhtury, dari Abi Abd Allah as: Dia berkata: Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar (uang/kekayaan), tetapi mereka mewariskan hadis-hadis. Orang yang mengambil hadis itu maka ia telah beruntung. Perhatikanlah ilmu kamu dari siapa kamu ambil. Pada kita ada ahl al-bait. Dalam setiap generasi terdapat keadilan yang menghilangkan kekafiran, menghapuskan kebatilan dan memberantas orang yang jahil.

Uraian ini menunjukkan bahwa yang diwarisi ulama dari Nabi adalah ilmu. Di dalamnya terdapat unsur lain yang wajib dijalankan ulama. Dengan demikian, masalah politik tidak diwariskan Nabi kepada ulama. Dalam hal ini Shari`atmadari kelihatannya tidak mengambil hadis sebagai dasar pemikiran tentang politik, kecuali dalam keadaan terpaksa. Bagi Shari`atmadari tugas ulama yang utama adalah melindungi apakah syari`at dapat berjalan dalam masyarakat, dapat memberantas korupsi yang dilakukan oleh orang-orang pemerintah.

Inilah salah satu perbedaan mendasar antara Shari`atmadari dengan Khomeni. Bagi Shari`atmadari kewajiban ulama yang utama adalah mengontrol negara dan memakai kekuasaan politik untuk mendorong supaya syari`at dijalankan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang benar.

Sistem politik yang digambarkan Shari`atmadari memang berbeda dengan sistem politik yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. dan sahabat.³⁵ Perbedaan itu merupakan tuntutan dari situasi dunia yang selalu berubah menjadi moderen. Namun dalam pendapat Shari`atmadari modernisasi tidak bertentangan dengan tradisi ajaran Islam. Shari`atmadari juga mengungkapkan bahwa masyarakat kita tidak berdemonstrasi terhadap modernisasi, tetapi modernisasi itu dihadapkan untuk menentang kediktatoran.³⁶

Di samping itu dalam sosial budaya Shari`atmadari juga memunculkan pandangan yang lebih liberal sesuai dengan perkembangan budaya itu. Seiring dengan berdirinya rezim yang revolusioner terjadi pertentangan antara Shari`atmadari dengan Khomeni. Shari`atmadari berusaha untuk menghindari pertentangan keras untuk menjaga kesatuan umat setelah pemerintahan Islam yang baru itu berdiri.

Sifat liberal Shari`atmadari menyebabkan para pengikutnya bertambah simpati dan sikap itu menjadi perhatian khusus bagi Khomeni.³⁷ Puncak konflik antara Shari`atmadari dengan Khomeni adalah sewaktu munculnya isu tentang konstitusi baru dalam rangka melindungi terjadinya demonstrasi yang lebih besar dari etnis-etnis minoritas dan kelompok-kelompok politik liberal yang mendukung Shari`atmadari.³⁸

Sifat liberal Shari`atmadari juga terlihat dalam berbagai faktor yang dianggap berhubungan dengan perbedaan paham dengan Khomeni dalam masalah referendum. Bagi Shari`atmadari tidak menjadi persoalan, apakah sebuah pemerintahan itu berbentuk monarkhi atau republik. Yang penting baginya adalah berjalannya syari`at dalam negara. Dengan kata lain Shari`atmadari melihat bagaimana menerapkan hukum Islam secara benar sesuai dengan perkembangan bukan hanya mempertimbangkan Islam sebagai sumber hukum.³⁹ Shari`atmadari membela Islam sebagai prinsip yang kuat terhadap perkembangan zaman. Sebuah republik Islam menurut dia adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas muslim. Jadi dalam hal ini yang diinginkan Shari`atmadari sejauh mana orientasi dari hukum Islam itu dijalankan dalam masyarakat.

Sebuah revolusi bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan bagaimana syari`at bisa berjalan dalam masyarakat. Ini merupakan latar belakang masyarakat Iran yang belum menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran tuntutan Islam. Bagi Shari`atmadari sebuah revolusi diadakan dalam rangka memprotes tindakan syah yang brutal. Bagi Shari`atmadari hal dilakukan cukup dengan menerapkan konstitusi 1906-1907. Inti dari konstitusi itu adalah memberikan kekuatan veto kepada lima orang mujtahid marja` taqlid dalam mengontrol kegiatan dan keaktifan pemerintah.

Konsep kepemimpinan Imam yang masih ditonjolkan Khomeni tidak diterima oleh Shari`atmadari. Bagi Shari`atmadari republik Islam

sekarang akan berbeda dari perkembangan Islam yang ada pada masa Nabi dan Ali ibn Abi Talib. Nabi Muhammad saw. dan Ali ibn Abi Talib diangkat Allah swt. dan bertanggung-jawab kepada-Nya. Pada masa sekarang tidak ada lagi nabi dan imam yang menjadi pemimpin negara. Yang ada ialah orang biasa yang dipilih oleh orang biasa pula untuk menjadi pemimpin. Itulah demokrasi yang pemerintahannya dari rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman monarkhi dan republik bukan penambahan dari demokratisasi. Berbeda dengan Khomeni, Shari`atmadari mengemukakan bahwa para ulama bertugas mengawasi persoalan duniawi dalam keadaan tertentu. Mereka menafsirkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara konstitusi dan Islam barulah para ulama berkewajiban untuk menengahi persoalan itu.⁴⁰ Campur tangan para ulama dalam masalah politik memang dibenarkan jika parlemen membuat undang-undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan doktrin Islam. Begitu pula bila tidak ada lagi pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam.⁴¹

Jalan yang ditempuh Shari`atmadari untuk menghindari campur-tangan ulama dalam masalah politik adalah *marja` taqlid*,⁴² sebab menurut dia keikutsertaan ulama dalam politik akan merendahkan derajat ulama itu sendiri.

Perbedaan konsep tentang otoritas ulama dalam politik inilah yang menyebabkan semakin jauhnya perselisihan antara Shari`atmadari dengan Khomeni yang diikuti oleh para pendukungnya masing-masing. Khomeni merupakan figur yang berhasil membentuk Republik Islam Iran, sementara Shari`atmadari sebagai ulama senior menjadi lawan politik yang keras bagi Khomeni. Dengan demikian, kritik yang selalu dilancarkan Shari`atmadari terhadap Khomeni semakin memperburuk hubungan antara kedua tokoh ini.

Menurut Shari`atmadari bentuk negara yang direncanakan adalah Republik Islam yang bukan bercorak demokrasi, tetapi bercoarak monarkhi. Kritik Shari`atmadari ada benarnya karena Khomeni mengajak untuk menghapuskan undang-undang yang dibuat dalam tahun 1925-1941. Dalil yang dikemukakan Khomeni ialah bahwa undang-undang itu bertentangan dengan keinginan Allah, dan ia mengingatkan pembacanya bahwa para ulama di awal kemunculan Islam adalah mendukung monarkhi.⁴³

Shari`atmadari yang diangkat para pendukungnya sebagai pemimpin partai IMIRPP selalu menjadi lawan politik dan ekonomi. Sewaktu Shari`atmadari menolak ide Khomeni, secara spontan pengikut Shari`atmadari mengemukakan bahwa dalam sebuah demokrasi mesti terdapat multi partai. Konsep ini ditentang oleh Khomeni karena ide Republik Islam tidak boleh mengacu kepada konsep Barat dengan demokrasi konstitusi. Tetapi konsep Khomeni itu merupakan pemerintahan yang didominasi oleh ideologi multi partai.⁴⁴ Implikasi dari sistem multi partai ini adalah munculnya kebebasan bagi rakyat dalam menentukan bentuk ideologi negara dan itu jelas bertentangan dengan monarkhi.

Sebuah negara yang memakai pemerintahan republik mesti mempunyai arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menghindari bentrok dengan Khomeni, Shari`atmadari tidak mengharuskan disebut atau tidaknya kata-kata demokrasi di antara kata republik dan Islam. Bagi Shari`atmadari tidak ada salahnya kalau tidak disebutkan demokrasi. Secara otomatis sebuah pemerintahan republik sudah mesti berbentuk demokrasi karena kedaulatan terletak di tangan rakyat.⁴⁵

Shari`atmadari juga mengkritik kebijakan Khomeni dalam mengangkat Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri setelah Sapur Bakhtiar meninggalkan Teheran pada tahun 1979. Kebijakan Khomeni itu merupakan taktik untuk mempersiapkan berdirinya sebuah negara Islam.

Kebijakan Khomeni mengangkat perdana menteri baru itu menurut Shari`atmadari adalah suatu kelicikan Khomeni untuk merebut pendukung sehingga mudah mendapat kekuasaan tertinggi di Iran. Hasil dari kebijaksanaan ini otomatis tidak membawa suara bulat, tetapi adalah suara terbanyak yang dianggap kecurangan pemerintah dalam mendapatkan pendukung.⁴⁶

Shari`atmadari juga cukup respek terhadap koran-koran Ayandigan yang menyiarkan kesyahidan ulama. Shari`atmadari mengecam tindakan Khomeni yang langsung mengkritik koran itu. Sekali lagi pernyataan ini membawa permusuhan yang semakin mendalam di antara dua tokoh ini. Pernyataan Ayandigan mengungkapkan bahwa oposisi itu didasarkan atas peran ulama dan sekaligus menyangkut masalah agama.⁴⁷ Bagi

Shari`atmadari pernyataan Ayandigan itu dianggap sebagai kebebasan pers, walaupun pertanggungjawabannya sangat berat karena bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Shari`atmadari adalah orang yang berpaham konservatif dengan alasan sangat tergantung kepada kepercayaan, namun ia juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Shari`atmadari memandang kepada masa lalu sebagai hal yang harus diperhatikan dan menjadikannya sebagai kunci bagi perkembangan masa depan.

V

Kesimpulan

Shari`atmadari adalah seorang ulama yang mempunyai pengaruh besar di Iran. Ia tergolong dalam kelompok ulama konservatif moderat dengan pengikutnya yang cukup banyak. Ketika menjalankan misi di Azerbaijan, Tabriz, Qum, sebagai tokoh politik ia menggabungkan diri dengan kelompok *mujahidin* khalq dan *Fidayen* khalq. Sikapnya ini menyebabkan dia digolongkan kepada orang yang tidak mendukung revolusi.

Dalam masalah pemerintahan Shari`atmadari berpendapat bahwa ulama tidak perlu terlibat langsung dalam politik kecuali dalam kondisi tertentu, atau keadaan mendesak. Tugas ulama yang utama adalah memperhatikan dan melindungi jalannya syari`at dalam masyarakat dan menentang tindakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan syariat itu. Shari`atmadari tidak mengharuskan negara dipimpin oleh ulama. Dengan demikian, ia tidak mendukung kebijakan Khomeni dalam mendirikan negara Islam. Shari`atmadari mengambil dasar pikirannya ini dari kepemimpinan Nabi. Inti dari kepemimpinan Nabi itu ialah terpisahnya antara persoalan negara dan persoalan agama. Pola itu sama dengan pandangan Ali Abd Raziq yang memisahkan antara kekuasaan spritual dan kekuasaan temporal. Risalah Nabi hanya dalam masalah spritual sedangkan masalah temporal adalah termasuk tuntutan sosial yang selalu berubah. Pemisahan kedua kekuasaan ini mengakibatkan munculnya konsep Shari`atmadari bahwa membentuk negara Islam bukan keharusan, dan membentuk negara adalah tuntutan alam yang tidak terkait dengan otoritas agama.

¹Bernat Lewis, "Islam Concept of Revolution" dalam *Revolution in the Middle East*, Allen & Erdin, London, 1972, hlm. 33.

²Shahrough Akhavi, *Religion and Politic in Contemporary Iran, Clergi State Relations in the Pablevi Period*, State University of New York Press, Albany, 1980, hlm. 55.

³John Obert Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World*, Westview Press Boulder, Colorado, 1982, hlm. 83.

⁴*Ibid.*, hlm. 105.

⁵Moojan Momen, *An Introduction to Syi`i Islam*, Yok University Press, New Haven and London, 1985, hlm. 137-138.

⁶Disimpulkan dari Shahrougt Akhavi, *op. cit.*, hlm. 91-96.

⁷Akhavi, *op. cit.*, hlm. 163.

⁸*Ibid.*, hlm. 102.

⁹Leonard Binder, *Islamic Liberalism*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1988, hlm. 89.

¹⁰Erdwar Mortimer, *Faith and Power*, Vintage Book, A, Devision Random House, New York, 1982, hlm. 307.

¹¹Ide sekuler ini dipedomani Reza Khan dari Mustafa Kamal (Kamal Attaturk) yang berhasil mengalahkan intervensi asing di Turki. Reza berupaya memberi sumbangan kepada Iran berupa suatu pemerintahan yang didukung oleh tokoh mederen didikan Barat untuk memerintah negeri itu. *Ibid.*, hlm. 307.

¹²Ervan Abrahamian, *Islam Between Two Revolution*, Princiton University Press, New Jersey, 1982, hlm. 112.

¹³Sistem pendidikan tersebut dibawa oleh Kemal Attaturk dan diperkenalkan di Turki yang warga negaranya tidak melepaskan diri dari ikatan agama. Di Mesir pembukaan cadar bagi wanita dikemukakan oleh Qasim Amin, karena dengan cadar itu pemikiran wanita menjadi tertutup sehingga hal itu menghalangi kemajuan. Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*, Mc Gill University Press, Montreal, 1964, hlm. 176 dan 389.

¹⁴Edward Mortimer, *op. cit.*, hlm. 309.

¹⁵Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 42.

¹⁶Kemal H. Karppat, *Politic and Social Thought in Contemporary Middle East*, Preager Special Studies, New York, 1982, hlm. 466.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Abd Ja`far ibn Yaquub ibn Ishak al-Kurmini al-Rezi, *al-Ushul min al-Kafi*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1988, 192-103.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 36-37.

²⁰*Ibid.*, hlm. 86.

²¹Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 100-101.

²²*Ibid.*, hlm. 101.

²³*Ibid.*

²⁴Nikki R. Keddi, *Root of Revolution*, Yole University Press, 1981, hlm. 208.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moojan Momen, *op. cit.*, hlm. 390.

²⁷ Sifat liberal dari golongan ini kelihatannya menyimpang dari ajaran Syi'ah. Salah satu penyimpangannya ialah memberi hak suara kepada wanita, memberikan peluang untuk mengadakan komunikasi dengan Shah untuk menciptakan pemerintahan yang moderat dan mengadakan lobi dengannya dalam melindungi aliran-aliran dan gerakan-gerakan yang bersifat agama. Ervan Abrahamian, *op. cit.*, hlm. 474.

²⁸ Shaul Bakhas, *The Right of Ayatullah Iran and Islamic Revolution*, Basic Book Inc., New York, United State of America, 1979, hlm. 72.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 168-169.

³⁰ Kelompok-kelompok ini pada mulanya didirikan oleh mahasiswa Universitas Teheran pada tahun 1963 M. dari zaman yang berbeda. Sebelumnya partai-partai ini berawal dari kelompok rahasia yang berjuang menentang kediktatoran Shah. Kelompok ini diinterpretasikan sebagai ungkapan retorika dari Husen yang muncul dalam rangka menentang pemerintahan Islam. Kelompok ini membentuk diri mereka menjadi kelompok-kelompok teroris. Moojan Momen, *op. cit.*, hlm. 240. Bandingkan dengan Akhavi, *op. cit.*, hlm. 177, dan Abrahamian, *op. cit.*, hlm. 80-84.

³¹ Colin Legum, *Middle East Contemporary Survey*, Holmes and Meier Publisher Inc., New York and London, 1979-1980.

³² Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 108.

³³ Shaul Bakhas, *op. cit.*, hlm. 73.

³⁴ Al-Khulaini, Abu Ja'far ibn Ya'qub ibn Ishaq, *al-Ushul min al-Kafi*, Dar al-Islamiyah, Teheran 1988 M / 1388 H. hlm. 32.

³⁵ Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali merupakan pemimpin yang memegang masalah agama dan masalah negara sekaligus. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya kepemimpinan agama dan kepemimpinan negara dipisahkan. Pemisahan itu disebabkan oleh perbedaan yang terdapat antara persoalan spritual dan persoalan temporal. Dengan meminjam konsep Ali ibn Abd al-Raziq dipahami bahwa misi seorang nabi hanya dalam spritual saja, sedangkan tugas kemasyarakatan yang dijalankan Nabi berasal dari misi kenabian, tetapi hal itu hanyalah sekedar tuntutan dari tatanan kemasyarakatan yang senantiasa berubah. Lihat Albert Hourani, *Arabic Thought in the Leberal Age 1798-1939.*, Cambridge University Press, New York, London, and Malborne Sydney, 1983, hlm. 186-188.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Colin Legum, *op. cit.*, hlm. 456.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 508-509.

³⁹ Konsep Shari'atmadari tentang tugas ulama dalam negara tidak dituangkan dalam bentuk buku. Shari'atmadari hanya menerapkannya melalui interview. Pemerintahan Islam menurut dia bukanlah berdasarkan monarki, walaupun ketidakadilan rezim Pahlevi tunduk ke Barat. Shari'atmadari menyayangkan kebanyakan para pemimpin muslim revolusioner mengartikan revolusi konstitusi telah berakhir. Nikki Keddi, *op. cit.*, hlm. 208-209.

⁴⁰ Colin Legum, *op. cit.*, hlm. 509.

⁴¹ Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 174.

⁴² Fungsi *marja` taqlid* merupakan akibat pasti dari kemestian rasional untuk meminta nasehat kepada mereka yang ahli dalam masalah-masalah syari'at dan pantas diakui karena kaelimannya yang tertinggi di antara para alim. Lihat Abdulaziz Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah*, Mizan Bandung, 1991, hlm. 336. Dalam persoalan politik ini Shari'atmadari berbeda dengan Khomeni karena menurut Khomeni ulama harus terlibat dalam politik menyebabkan ia memakai konsep *wilayah al-Fakih*. Prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan agama dipegang oleh para ulama selama gaibnya imam. Pengaturan segala urusan diserahkan kepada ulama yang benar-benar alim terhadap Allah serta hukum-hukum-Nya, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Tujuan dari liberalitas ulama selama dalam pemerintahan adalah untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organisasi negara dari tugas-tugasnya yang islami dan hakiki. Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Humas Kedutaan Republik Islam Iran Jakarta, t. t., hlm. 9-10.

⁴³ Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 163.

⁴⁴ Lihat Botworth Charless Issawi, *The Islamic World*, The Darwin Press Inc., Pricenton, New Jersey, t.t. hlm. 828.

⁴⁵ Khomeni sebagai orang yang tidak setuju dengan penambahan kata demokrasi selalu mengaitkan masalah ini dengan Front Demokrasi Nasional yang dipimpin oleh Ayatullah Martin Daftari. Demokrasi yang dimaksudkannya sebenarnya adalah demokrasi liberal yang dibawa oleh Muhammad Musadeq dan demokrasi itu memiliki organisasi. Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 175.

⁴⁶ Kekalahan Shari'atmadari dalam politik untuk menjalankan ide progresifnya menemui jalan buntu. Hal ini menuntut dia untuk mengambil jalan lain yaitu memasuki golongan kiri yang ekstrim. Golongan kiri dimaksud adalah Mujahidin Khalq, Fidayen Khalq di Iran. Shahrough Akhavi, *op. cit.*, hlm. 176-177.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 177.